

Efektivitas Pelaksanaan Program Stunting di Kabupaten Buton Tengah

Effectiveness of Stunting Program Implementation in Buton Tengah Regency

Reyni Prasetyani^{1,2,*}, Andi Tenri², Asmiddin²

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah,
Labungkari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

²Program Studi Magister Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin,
Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

*Email Korespondensi: reyni@rolanrusli.com

Abstrak

Stunting adalah suatu kondisi seseorang memiliki keadaan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Kondisi stunting di Kabupaten Buton Tengah menduduki salah satu urutan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah, maka perlu dilakukan analisis efektivitas program stunting dengan penurunan angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental dengan melihat efektivitas program stunting dengan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi kenaikan prevalensi stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari kejadian stunting sebesar 1621 menjadi sebesar 1805 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa program stunting di Kabupaten Buton Tengah belum efektif dalam menurunkan kejadian stunting secara menyeluruh di Kabupaten Buton Tengah. Namun, program stunting telah efektif menurunkan kejadian stunting di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gu, Mawasangka Timur, dan Sangia Wambulu.

Kata Kunci: efektivitas, program, stunting

Abstract

Stunting is a condition where a person has a height that is not in accordance with their age. The stunting condition in Buton Tengah Regency is one of the highest in Southeast Sulawesi Province. To find out the extent of the implementation of the stunting reduction program in Buton Tengah Regency, it is necessary to analyze the effectiveness of the stunting program with a decrease in the incidence of stunting in Buton Tengah Regency in 2023. This study is a non-experimental descriptive study by

looking at the effectiveness of the stunting program with a decrease in the prevalence of stunting in Buton Tengah Regency in 2023. The results of the analysis show that there was an increase in the prevalence of stunting from 2022 to 2023, namely from 1621 stunting incidents to 1805 incidents. This shows that the stunting program in Buton Tengah Regency has not been effective in reducing the incidence of stunting as a whole in Buton Tengah Regency. However, the stunting program has been effective in reducing the incidence of stunting in three sub-districts, namely Gu, East Mawasangka, and Sangia Wambulu Districts.

Keywords: effectiveness, program, stunting

Diterima: 31 Mei 2024

Disetujui: 25 Juni 2024

DOI: <https://doi.org/10.25026/jsk.v6i3.2461>



Copyright (c) 2024, Jurnal Sains dan Kesehatan (J. Sains Kes.).
Published by Faculty of Pharmacy, University of Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
This is an Open Access article under the CC-BY-NC License.

Cara Sitasi:

Prasetyani, R., Tenri, A., Asmiddin, A., 2024. Efektivitas Pelaksanaan Program Stunting di Kabupaten Buton Tengah. *J. Sains Kes.*, 6(3). 423-430. DOI: <https://doi.org/10.25026/jsk.v6i3.2461>

1 Pendahuluan

Stunting adalah kondisi kronis yang timbul akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Terjadinya stunting dapat dikenali dari Z-skor Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang kurang dari -2 SD. Kejadian stunting sering kali disebabkan oleh defisiensi gizi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta tingkat kesakitan yang tinggi. Kondisi ini umumnya terjadi di negara-negara dengan kondisi ekonomi rendah [1]. Stunting merupakan salah satu bentuk malnutrisi kronis yang dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang tidak memadai di masa lalu. Faktor lain yang berperan dalam terjadinya stunting meliputi kesehatan dan status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, postur tubuh ibu yang pendek, jarak kehamilan yang terlalu dekat, usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, serta masalah dalam praktik pemberian ASI dan MPASI. Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi di tempat tinggal juga memiliki kaitan yang kuat

dengan tingkat stunting, karena mempengaruhi akses terhadap gizi yang memadai dan layanan kesehatan untuk ibu dan anak balita[2].

Permasalahan stunting saat ini menjadi salah satu permasalahan global. Stunting di Indonesia menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang perlu diselesaikan. Permasalahan stunting dimasukkan dalam regulasi perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang kemudian dilaksanakan secara bertahap dalam masing-masing tahun berjalan untuk mengurangi angka kejadian stunting di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai regulasi terkait dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan dan Keputusan Menteri terkait yang berhubungan langsung dengan permasalahan stunting.

Permasalahan stunting ini tidak hanya berhenti pada level nasional, sehingga program perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

stunting dilaksanakan pula hingga level pemerintah Daerah. Di Kabupaten Buton Tengah, permasalahan stunting ditindaklanjuti dengan mengeluarkan regulasi penurunan stunting dalam bentuk Peraturan Bupati No.39 Tahun 2020 tentang Intevensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Buton Tengah [3]. Namun, hingga kini belum ada SOP yang mengatur mengenai program termasuk perencanaan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah, sehingga angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah masih cukup tinggi.

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Sulawesi Tenggara menduduki peringkat kelima dengan prevalensi sebesar 30,2 persen melebihi angka prevalensi stunting secara Nasional. Kabupaten Buton Tengah berada pada peringkat kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan prevalensi sebesar 42,7 persen [4]. Sedangkan pada tahun 2022, Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Tengah berada pada urutan pertama tertinggi di Provinsi dengan prevalensi 41,6 persen [5]. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dinilai masih kurang dalam menurunkan prevalensi stunting.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah, maka perlu dilakukan analisis efektivitas program stunting dengan penurunan angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental dengan melihat efektivitas program stunting dengan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah. Data dikumpulkan melalui kuesioner atau wawancara serta dokumen pelaksanaan program stunting di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023. Data yang ada kemudian dianalisis untuk melihat seberapa besar efektif pelaksanaan program stunting terhadap penurunan angka kejadian stunting yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah.

3 Hasil dan Pembahasan

Stunting adalah kondisi kronis yang timbul akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Terjadinya stunting dapat dikenali dari Z-skor Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang kurang dari -2 SD. Kejadian stunting sering kali disebabkan oleh defisiensi gizi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta tingkat kesakitan yang tinggi. Kondisi ini umumnya terjadi di negara-negara dengan kondisi ekonomi rendah [1]. Pelaksanaan Program stunting pada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.

Pelaksanaan Program stunting pada Kabupaten Buton Tengah dimulai pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Kabupaten Buton Tengah belum ditetapkan sebagai lokus stunting sehingga pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan spesifik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengenai stunting. Sedangkan pada Tahun 2022 Kabupaten Buton Tengah baru ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu lokasi yang difokuskan untuk menurunkan prevalensi stunting melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [6]. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten Buton Tengah terjadi kenaikan angka kejadian stunting yaitu pada Tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 30,2 persen [4] dan naik menjadi 41,6 persen pada Tahun 2022 [5]. Dengan demikian, maka program stunting pada Kabupaten Buton Tengah baru dilaksanakan pada tahun 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa program stunting pada tahun 2023 terlihat jumlah kegiatan spesifik untuk menurunkan angka kejadian stunting adalah sebanyak 28 Kegiatan. Dana Kegiatan penurunan prevalensi stunting pada Kabupaten Buton Tengah bersumber dari Dana Transfer dari pemerintah pusat dan dana dari APBD murni. Pemberian dana transfer dari pemerintah pusat karena Kabupaten Buton Tengah telah dimasukkan ke dalam salah satu fokus penurunan kejadian stunting di Indonesia.

Tabel 1. Program Stunting pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023

No.	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Pelaksanaan KIE	BKKBN
2.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	BKKBN
3.	Pendampingan Keluarga Berisiko, Pencatatan Hasil Pemantauan dan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting	BKKBN
4.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	BKKBN
5.	Audit Kasus Stunting	BKKBN
6.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKKBN
7.	Pengadaan BKB KIT Stunting	BKKBN
8.	Penyelenggaraan Pelaksanaan aksi bergizi di sekolah (penyediaan tablet tambah darah)	Dinas Kesehatan
9.	Pengadaan Hb Meter	Dinas Kesehatan
10.	Sosialisasi Pentingnya Minum TTD dan Pelaporan Pernikahan pada calon Pengantin dan WUS	Dinas Kesehatan
11.	Belanja bahan, dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi Bumil KEK	Dinas Kesehatan
12.	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	Dinas Kesehatan
13.	Pembentukan KPASI	Dinas Kesehatan
14.	Sosialisasi Demo Masak MP-ASI Berbahan Lokal	Dinas Kesehatan
15.	Paket Formula WHO Gizi Buruk (Pelayanan Gizi Buruk)	Dinas Kesehatan
16.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
17.	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita gizi kurang	Dinas Kesehatan
18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
19.	Pertemuan Pelatihan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) Stunting	Dinas Kesehatan
20.	Pengadaan antropometri di posyandu	Dinas Kesehatan
21.	Sosialisasi konsumsi makan ikan (Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Dinas Perikanan
22.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan
23.	Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
24.	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
25.	Pembuatan konten media sosial kampanye pencegahan stunting	Dinas Kominfo
26.	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air, Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an	Dinas PUPRTR
27.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala Permukiman	Dinas PUPRTR
28.	Pembangunan tangki septik Komunal (5-10 KK)	Dinas PUPRTR

Anggaran Program Stunting Kabupaten Buton Tengah sudah sesuai dengan mekanisme dan SOP peruntukan anggaran. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah langsung bersentuhan kepada masyarakat terutama keluarga sasaran berisiko stunting seperti bantuan pangan, dan lain-lain. Hal inilah yang diduga menyebabkan penurunan angka kejadian stunting di beberapa wilayah di Kabupaten Buton Tengah. Namun ada beberapa indikator yang belum dapat dianggarkan, serta kurangnya anggaran dan ketidaksesuaian program. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah.

Kegiatan penurunan kejadian stunting ini dilakukan oleh beberapa OPD yang berada di Buton Tengah. OPD tersebut adalah Bappeda, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, dan Dinas Perikanan, serta Dinas PUPRTR. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan acuan dari Pemerintah Pusat mengenai Kerangka Intervensi Stunting. Kerangka Intervensi Stunting yang dilakukan

oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat pula bahwa dari total 28 kegiatan program Stunting pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 terlihat sebanyak 14 kegiatan atau sebesar 50% dari jumlah kegiatan stunting dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan karena Intervensi Gizi Spesifik merupakan intervensi yang berkontribusi secara langsung pada penurunan stunting yaitu 30% penurunan stunting [7, 8]. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita:

Sisa kegiatan dari Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik yang dilakukan terbagi ke dalam beberapa OPD. Kegiatan lain yang dilakukan di luar sektor Kesehatan dikenal sebagai Intervensi Gizi Sensitif. Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif ini dapat berkontribusi pada 70% Intervensi Stunting [7, 9-14]. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita. Kegiatan terkait Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas OPD.

Kondisi stunting merupakan kondisi kompleks yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Peran pemerintah dalam penurunan angka kejadian stunting perlu ditingkatkan terutama dalam multi sektor yang melibatkan berbagai OPD. Kegiatan stunting ini perlu melibatkan keterlibatan OPD dan perlu adanya koordinasi dari berbagai OPD sehingga diperoleh hasil program yang sukses berupa penurunan angka kejadian stunting pada Kabupaten Buton Tengah.

Keterlibatan Pemerintah dalam Upaya menurunkan angka kejadian stunting sangat dominan, melalui peran OPD yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan program penurunan stunting di OPD mereka masing-masing. Namun dibutuhkan peran dari berbagai pihak dalam Upaya menurunkan angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah.

Peran serta Masyarakat dan pihak lain yang terkait stunting sangat membantu dalam menurunkan angka kejadian stunting di Buton Tengah. Peran pihak lain seperti swasta di Buton Tengah sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada karena belum adanya industri di Buton Tengah.

Sedangkan peran pihak lain saat ini masih didominasi oleh Masyarakat setempat dalam Upaya penurunan stunting di Buton Tengah. Peran Masyarakat ini antara lain melalui kegiatan Rembuk Stunting atau kegiatan posyandu, dan lain-lain. Rembuk stunting

merupakan metode yang efektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, ahli gizi, petugas kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kerjasama masyarakat dalam upaya pencegahan stunting [15].

Upaya penurunan angka kejadian stunting ini dilibatkan secara langsung para Kepala OPD di Kabupaten Buton Tengah dan pihak lain ikut serta sebagai bapak/bunda asuh untuk bertanggungjawab mengikuti perkembangan keluarga sasaran stunting agar segera terlepas dari kondisi stunting yang dialami oleh keluarga tersebut. Hal inilah yang diduga menyebabkan terjadinya penurunan angka kejadian stunting di tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Buton Tengah.

Akan tetapi, pelaksanaan program stunting di Kabupaten Buton Tengah, terdapat ketidaksesuaian indikator yang dilaksanakan oleh OPD terkait terhadap pelaksanaan program. Sebagai contoh, terdapat indikator program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu berupa pemenuhan Guru PAUD yang memiliki kompetensi menangani anak stunting, namun pada pelaksanaannya kegiatan yang dilaksanakan bukan merealisasikan indikator tersebut, namun mereka melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi terkait stunting kepada guru-guru. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab peningkatan angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah, karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan indikator pada OPD.

Secara umum kegiatan percepatan penurunan stunting sudah dapat mencegah dan menurunkan balita stunting dan keluarga berisiko stunting, walaupun beberapa indikator selama ini belum dapat dilihat perkembangannya, seperti pasangan usia subur dengan status miskin yang menerima bantuan sosial tunai dan sejenisnya karena efeknya tidak dapat diamati pada tahun berjalan.

Tabel 2. Angka Kejadian Stunting Tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Buton Tengah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kejadian stunting (Orang) pada Tahun		
			2022	2023	Perbedaan
1.	Gu	93.1	199	130	-69
2.	Lakudo	204.3	331	525	194
3.	Mawasangka	229.02	553	561	8
4.	Mawasangka Tengah	121.99	286	358	72
5.	Mawasangka Timur	93.35	123	70	-53
6.	Sangia Wambulu	5.91	91	77	-14
7.	Talaga Raya	89.49	38	84	46
Total		837.16	1621	1805	184

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Total angka kejadian stunting pada Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kejadian stunting yaitu dari 1621 orang yang mengalami stunting menjadi 1805 orang, atau naik sebanyak 184 angka kejadian stunting. Peningkatan kejadian stunting ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain asupan gizi yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas [1].serta kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari [2]. Selain itu stunting juga disebabkan oleh faktor multi dimensi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, Masih terbatasnya layanan kesehatan yang berkualitas, Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, faktor penyebab stunting lainnya; kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan, postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan, tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini (IMD), gagalnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan dini, kuantitas, kualitas, dan kemandirian pangan MPASI yang diberikan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting [2, 7, 9, 14, 16-21].

Berdasarkan Tabel 2 walaupun terlihat bahwa total kejadian stunting pada Kabupaten Buton Tengah terjadi peningkatan, namun pada beberapa kecamatan terlihat adanya penurunan angka kejadian stunting seperti pada Kecamatan Gu mengalami penurunan kejadian stunting pada tahun 2022 dari 199 orang menjadi 130 orang pada tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 69 kejadian.

Selain itu terjadi penurunan angka kejadian stunting pada Kecamatan Mawasangka Timur, yaitu dari 123 kejadian menjadi 70, atau terjadi penurunan kejadian stunting sebesar 53 kejadian stunting. Kecamatan lain yang mengalami penurunan kejadian stunting adalah Kecamatan Sangia Wambulu, yang mengalami penurunan kejadian stunting sebesar 14 kejadian, atau turun dari 91 kejadian pada tahun 2022 menjadi 77 angka kejadian stunting di tahun 2023. Asupan zat gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya agar tidak terjadi gagal tumbuh (*growth faltering*) yang dapat menyebabkan stunting. Untuk memenuhi kecukupan gizi pada balita, dapat dilakukan dengan program pemberian makan tambahan (PMT) khususnya PMT berbahan dasar lokal. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita [9, 22-28].

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan untuk Kabupaten Buton Tengah program stunting belum berpengaruh terhadap penurunan kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah. Hal ini dapat dikatakan bahwa program stunting belum efektif dalam menurunkan kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah. Salah satu faktor penyebab naiknya angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah dapat disebabkan akibat dari meningkatnya angka kemiskinan yang terjadi pada Kabupaten Buton Tengah yaitu Garis Kemiskinan dari 275.058 pada Tahun 2022, naik menjadi 299.593 pada Tahun 2023 [29].

Namun jika ditinjau dari masing-masing kecamatan, maka dapat dikatakan bahwa program yang dilakukan efektif dalam

menurunkan kejadian stunting pada kecamatan tersebut. Hal ini dapat diduga karena pada kecamatan yang mengalami penurunan kejadian stunting tersebut memiliki luasan wilayah yang lebih kecil (Tabel 2) sehingga lebih mudah bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan pelayanan stunting, serta dalam sistem monitoring dan evaluasinya, sehingga kejadian stunting pada beberapa kecamatan tersebut dapat diturunkan. Akan tetapi untuk Kecamatan Talaga Raya juga memiliki luasan wilayah yang lebih kecil tidak mengalami penurunan kejadian stunting karena akses wilayah Talaga Raya yang lebih sulit dijangkau sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan kegiatan terkait stunting.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah dapat menurunkan kejadian stunting secara menyeluruh pada Kabupaten Buton Tengah.

4 Kesimpulan

Program stunting pada Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2023 belum efektif dalam menurunkan kejadian stunting secara menyeluruh di Kabupaten Buton Tengah. Akan tetapi program stunting efektif dalam menurunkan kejadian stunting di 3 kecamatan di Buton Tengah, yaitu Kecamatan Gu, Mawasangka Timur, dan Sangia Wambulu.

5 Pernyataan

5.1 Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas izin penelitian yang diberikan.

5.2 Penyandang Dana

Penelitian ini tidak mendapatkan pendanaan dari sumber manapun.

5.3 Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

5.4 Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan.

6 Daftar Pustaka

- [1] Ni'mah, K. and S.R. Nadhiroh, *Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita*. Media Gizi Indonesia, 2015. 10(1): p. 13-19.
- [2] Sutarto, S., D. Mayasari, and R. Indriyani, *Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. Agromedicine Unila, 2018. 5(1): p. 540-545.
- [3] Perbup No. 39 Tahun 2020, P.B., *Peraturan Bupati No.39 Tahun 2020 tentang Intevensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Buton Tengah*.
- [4] Kemenkes, *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021*. 2021, Kementerian Kesehatan RI: Jakarta.
- [5] Kemenkes, *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. 2023, Kementerian Kesehatan RI: Jakarta.
- [6] PPN/Bappenas, K., *Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021*. 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- [7] Choliq, I., D. Nasrullah, and M. Mundakir, *Pencegahan stunting di Medokan Semampir Surabaya melalui modifikasi makanan pada anak*. Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020. 1(1).
- [8] Sari, D., S.A. Nugraheni, and M.Z. Rahfiludin, *Bagaimana Kontribusi Intervensi Gizi Sensitif dalam Upaya Penurunan Stunting?: Literature Review*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), 2023. 6(5): p. 885-895.
- [9] Archda, R. and J. Tumangger, *Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia*. 2019.
- [10] Asatuti, N.B., et al., *Pemantauan Status Gizi Dan Edukasi Gizi pada Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting*. ASMAT: Jurnal Pengabmas, 2021. 1(1): p. 46-56.
- [11] Lailia, I., K. Kismartini, and A.Z. Rahman, *Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang*. Journal of Public Policy And Management Review, 2021. 10(3): p. 194-207.
- [12] Anggreani, R.D., A. Margawati, and N. Nurjazuli, *Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistemik Review*. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2021. 14(2): p. 139-151.
- [13] Roshana, B.C., et al., *Peran intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam perbaikan masalah gizi balita di Kota Bogor*. Buletin Penelitian Kesehatan, 2016. 44(2): p. 127-138.
- [14] Setyawati, V.A.V. and F. Ramadha, *Pengaruh kampung KB pada intervensi gizi sensitif*

- stunting di Desa Janegara*. Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition), 2020. **9**(1): p. 42-47.
- [15] Samsir, S., et al., *Peran Rembuk Stunting dalam Mewujudkan Anak Sehat di Desa Teluk Pambang*. Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2023. **1**(4): p. 31-38.
- [16] Hardani, M. and R. Zuraida, *Penatalaksanaan gizi buruk dan stunting pada balita usia 14 bulan dengan pendekatan kedokteran keluarga*. Medula, 2019. **9**(3): p. 565-575.
- [17] Setiadi, H., S. KM, and S. Fifi Dwijayanti. *Pentingnya kesehatan masyarakat, edukasi dan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi stunting di negara berkembang*. in *Jurnal Seminar Nasional*. 2020.
- [18] Priyono, P., *Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)*. Jurnal Good Governance, 2020.
- [19] Hapsari, W. and B. Ichsan. *Hubungan pendapatan keluarga, pengetahuan Ibu tentang gizi, tinggi badan orang tua, dan tingkat pendidikan ayah dengan kejadian stunting pada anak umur 12-59 bulan*. in *Prosiding University Research Colloquium*. 2021.
- [20] Marbun, M., R. Pakpahan, and A.K. Tarigan, *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting Dipuskesmas Parapat Kecamatan Parapat Kabupaten Simalunguntahun 2019*. Jurkessutra: Jurnal Kesehatan Surya Nusantara, 2019. **7**(2).
- [21] Cahyati, N. and C.C. Islami, *Pemahaman Ibu Mengenai Stunting dan Dampak Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini, 2022. **2**(2): p. 175-191.
- [22] Adriyani, F.H.N., A. Hikmanti, and R.K. Sugiharti, *Pemenuhan pangan lokal sebagai kebutuhan gizi bayi dan balita umur 6-24 bulan di kabupaten Banyumas*. Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS, 2022. **1**(1): p. 29-37.
- [23] Ariyanto, A., T.Y. Fatmawati, and N. Efni, *PKM Gizi Seimbang Anak Usia Pra Sekolah di TK Islam Baiturrahim*. Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK), 2023. **5**(1): p. 12-17.
- [24] Ringgi, M.S.I.N. and Y.M. Keuytimu, *Intervensi Berbasis Edukasi pada Ibu terhadap Feeding Practice Ibu dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Stunting pada Usia 6-24 Bulan*. Jurnal Kesehatan, 2022. **13**(1): p. 118-123.
- [25] Oktafirnanda, Y. and H.P. Harahap. *Analisis Faktor Resiko Kejadian Stunting Di Desa Helvetia*. in *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*. 2021.
- [26] Sunartiningsih, S., I. Fatoni, and N.M. Ningrum, *Hubungan Inisiasi Menyusu Dini Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-24 Bulan*. Jurnal Kebidanan, 2020. **10**(2): p. 66-79.
- [27] Setiawandari, S. and A. Latifah. *Optimalisasi peran keluarga mencegah stunting melalui pendekatan emotional demonstration tidak memberikan camilan sembarangan*. in *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020*. 2020.
- [28] Meilyasari, F. and M. Isnawati, *Faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 12 bulan di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal*. 2014, Diponegoro University.
- [29] BPS, *Kabupaten Buton Tengah dalam Angka 2024*. 2024, BPS Kota Baubau: Baubau.